



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI  
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM DAN DPD RI DALAM RANGKA  
USULAN PERUBAHAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2017**

**TANGGAL 04 SEPTEMBER 2017**

---

Tahun Sidang	: 2017- 2018
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 3 (tiga)
Jenis rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Senin, 04 September 2017.
P u k u l	: 15.00 WIB s/d 16.20 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan usulan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.
Ketua Rapat	: Arif Wibowo
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 25 orang, izin 10 orang dari 74 orang Anggota. - Menteri Hukum dan Ham beserta jajaran. - Pimpinan PPUU DPD RI beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menkumham dan DPD RI dalam rangka evaluasi dan usulan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Arif Wibowo.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.00 WIB, rapat dimulai dengan penyampaian evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan usulan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

### **A. Pandangan/masukan dari Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi terkait dengan Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan**

**Usulan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, sebagai berikut:**

1. Perkembangan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dapat dilaporkan sebagai berikut :

Dari 49 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2017, RUU yang telah disahkan menjadi Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) RUU; RUU dalam tahap Pembicaraan TK. I sebanyak 21 (dua puluh satu) RUU; RUU dalam proses menunggu Surpres sebanyak 1 (satu) RUU; RUU dalam tahap menunggu Rapat Paripurna sebanyak 1 (satu) RUU; RUU dalam tahap harmonisasi sebanyak 4 (empat) RUU; RUU dalam tahap penyusunan di Komisi / Anggota sebanyak 11 (sebelas) RUU; RUU dalam tahap penyusunan di Pemerintah sebanyak 7 (tujuh) RUU; dan RUU dalam tahap penyusunan di DPD RI sebanyak 1 (satu) RUU.
2. Dari 21 (dua puluh satu) RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I, terdapat 15 (lima belas) RUU yang telah masuk dan melampaui batas waktu pembahasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Tatib DPR RI.
3. Mengingat masih rendahnya capaian Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, diharapkan usulan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas usulan dari beberapa komisi dan juga Anggota perlu mendapatkan pertimbangan dari semua pihak .
4. Usulan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dari DPR (Komisi dan Anggota DPR RI), sebagai berikut :
  - a. RUU tentang Jalan dan RUU tentang Sumber Daya Air yang diusulkan oleh Komisi V.
  - b. RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik yang diusulkan oleh Komisi X.
  - c. RUU tentang Konsultan Pajak yang diusulkan oleh Anggota DPR RI
  - d. RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial yang menggantikan RUU tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang diusulkan oleh Komisi VIII.
  - e. RUU tentang Permusikan yang diusulkan oleh Anggota DPR RI untuk dapat masuk dalam daftar Prolegnas Tahun 2015-2019.
5. Adanya aspirasi dari daerah-daerah yang telah dikunjungi oleh Badan Legislasi dalam kunjungan kerja ke daerah yang menginginkan adanya perubahan atas Undang-Undang yang terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
6. Meminta kepada Pemerintah untuk dapat melakukan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Meminta kerjasama dari Pemerintah/Kemenkumham terkait dengan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang saat ini akan segera disampaikan usulan penambahan substansi pada RUU tersebut.

**B. Pandangan/Tanggapan Pemerintah terkait dengan Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Usulan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, sebagai berikut:**

1. Pemerintah sangat mengapresiasi undangan Badan Legislasi dalam rangka melakukan evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan juga usulan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.
2. Berkenaan dengan pembahasan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, Pemerintah pada prinsipnya sepatutnya terhadap usulan dimaksud dengan tetap mengacu pada semangat menyempurnakan Prolegnas baik dari segi substansi maupun kuantitas yang lebih realistis, serta mempertimbangkan masa sidang yang tersisa pada tahun 2017.
3. Namun untuk RUU tentang Jalan kiranya dapat dipertimbangkan untuk dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dengan melibatkan stake holder terkait RUU dimaksud.
4. Pada kesempatan ini, Pemerintah pada dasarnya tidak melakukan usul perubahan terhadap RUU usulan Pemerintah dalam Prolegnas Prioritas 2017 yang merupakan perwujudan dari RPJMN (Nawacita) yang ditegaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah.
5. Pemerintah mengusulkan agar RUU yang diutamakan adalah RUU yang dapat mempercepat perekonomian Indonesia.
6. Pemerintah berharap, DPR RI bersama dengan DPD RI serta Pemerintah dapat terus meningkatkan komitmen, serta kerja sama dan saling pengertian untuk dapat segera menyelesaikan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang menjadi prioritas dalam Prolegnas tahun 2017.

**C. Pandangan/Tanggapan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI terkait dengan Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Usulan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, sebagai berikut:**

1. PPUU DPD RI sangat mengapresiasi undangan yang telah disampaikan oleh DPR melalui Badan Legislasi dalam pembahasan mengenai evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan usulan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.

2. DPD RI mengharapkan RUU yang merupakan usul dari DPD RI yang saat ini sudah dalam proses pembahasan/Pembicaraan Tk. I dapat segera diselesaikan, yaitu RUU tentang Wawasan Nusantara dan RUU tentang Ekonomi Kreatif.
3. Terkait dengan proses pembahasan/Pembicaraan Tk. I beberapa RUU yang sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI, DPD RI juga telah siap apabila dibutuhkan masukan/pandangannya dalam pembahasan RUU dimaksud, antara lain RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Pertanahan, dan yang lainnya.
4. DPD RI juga telah mempersiapkan NA dan draft RUU tentang Sumber Daya Air yang diusulkan untuk masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 sebagai bahan persandingan bagi DPR RI.
5. Terkait dengan adanya usulan RUU tentang Permukiman untuk dapat masuk dalam daftar Prolegnas Tahun 2015-2019, DPD RI juga mendukung hal tersebut.
6. Mengingat masih banyaknya permasalahan yang terjadi di daerah terkait dengan hak atas tanah adat, DPD RI mengusulkan agar RUU tentang Hak atas Tanah Adat dapat masuk dalam Prolegnas Tahun 2015-2019.

### III. KESIMPULAN

Rapat Kerja Kerja antara Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 sekaligus Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 menyetujui untuk menyepakati 3 (tiga) RUU masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan 1 (satu) RUU sebagai pengganti RUU pada Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan 2 (dua) RUU masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, yaitu:

NO	JUDUL RUU	USULAN	KETERANGAN
1.	RUU tentang Sumber Daya Air	DPR	Komisi V Perubahan Prioritas 2017
2.	RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik	DPR	Komisi X Perubahan Prioritas 2017
3.	RUU tentang Konsultan Pajak	DPR	Anggota Perubahan Prioritas 2017
4.	RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial (Pengganti RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)	DPR	Komisi VIII Perubahan Prioritas 2017

5.	RUU tentang Permusikan	DPR	Anggota Masuk dalam Prolegnas 2015- 2019
6.	RUU tentang Hak atas Tanah Adat	DPD	Anggota Masuk dalam Prolegnas 2015- 2019

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB

Jakarta, 04 September 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001